

## PRAJURIT YANG PROFESIONAL MENUJU TNI MODERN PADA ERA REFORMASI

**Lindra Kristiana,<sup>1</sup>**

Prodi Adminstrasi Pertahanan, Akademi Militer Magelang  
lindrakristianas.e.01@adminitrasihan.akmil.ac.id

**Paulina Siregar<sup>2</sup>**

Prodi Administrasi Pertahanan Akademi Militer Magelang  
paulinasiregar71@administrasihan.akmil.ac.id

**Sambas Burhanudin<sup>3</sup>,**

Program Studi Administrasi Pertahanan Akademi Militer Magelang Jawa Tengah  
sambasburhanudin163@gmail.com

---

### Abstrak

Tulisan ini membahas fenomena TNI yang tengah mengalami pergeseran dari militer praetorian menuju militer profesional seiring terjadinya perubahan mendasar dalam masyarakat Indonesia karena peralihan kekuasaan dari era pemerintah satu ke pemerintahan lain, dimana muncul berbagai kebijakan dari setiap pemimpin di generasinya. Pergeseran tersebut dapat dilihat dari isu-isu terkait keberadaan lembaga teritorial, bisnis militer, serta hubungan antara TNI dengan Departemen Pertahanan. Tulisan ini berargumen bahwa pergeseran tersebut dapat dijelaskan dengan tesis militer profesional patriot. Tulisan ini merupakan kombinasi aspek-aspek tertentu dari tesis **Huntington** mengenai profesionalisme militer yang disebut profesionalisme lama dengan aspek-aspek tertentu dari tesis **Stepan** yang disebut profesionalisme baru. Sebagai militer profesional patriot, selain hadir dengan karakteristik profesional TNI juga memiliki komitmen kuat untuk mengambil peran dalam tugas-tugas nonpertahanan berdasarkan keputusan pemerintah sipil. Untuk itu, TNI perlu berkembang dalam kondisi kontrol sipil objektif yang menitikberatkan profesionalisme militer itu sendiri, dan turut menjunjung supremasi sipil. Tulisan ini disusun dengan pendekatan sosiologi militer. Adapun proses penelitiannya dilakukan dengan menggunakan metode *kualitatif*. Pengertian **kualitatif** sendiri adalah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif dengan menganalisa kejadian, fenomena atau keadaan secara sosial.

### ***THE PROFESSIONAL SOLDIER MODERN TNI IN THE REFORM ERA***

#### ***Abstract***

This article discusses about The Indonesian National Defense Forces (Tentara Nasional Indonesia/TNI) who has been experiencing a shift from praetorian military to professional military because of fundamental change within Indonesian society after the end of the Soeharto's regime in 1998 which is followed by a transition of power from New Order to reformed government. That shift can be seen through some issues related to territorial institutions, military business, and relation between TNI and The Ministry of Defense (Departemen Pertahanan). This paper argues that that shift and its related issues can be explained by patriot professional military thesis. This thesis combines certain aspects of Huntington's old professionalism and Stepan's new professionalism. As a patriot professional military TNI has professional characteristics as well as strong commitment to take a part in nondefense tasks according to decisions of civilian government. To become patriot professional military TNI needs to develop itself in a condition with objective civilian control that promotes military professionalism, and highly respects the civilian supremacy. This paper approached its problem with sociology of military, and made its inquiry with qualitative method.

Keywords: civilian control, civilian supremacy, military professionalism, objective, TNI

## PENDAHULUAN

Sejak kelahirannya, sebagai alat negara di bidang pertahanan TNI telah mengalami perubahan-perubahan tertentu seiring perubahan di dalam masyarakat Indonesia. Perubahan besar akibat pergantian kekuasaan dari Orde Baru ke



pemerintahan era Reformasi, seiring dengan perubahan tata nilai di tingkat global, turut mempengaruhi pergeseran peran TNI dari tentara **Pretorian (tentara dengan jiwa saptamarga)**, yakni tentara yang turut terlibat dan melakukan intervensi dalam kehidupan politik, ke arah tentara profesional. Kendati demikian, hingga saat ini berbagai kalangan masih memperdebatkan hakikat profesionalisme TNI. Keberadaan Komando Teritorial (Koter), persoalan bisnis militer, dan hubungan struktural TNI Departemen Pertahanan (Dephan) menjadi isu yang cukup menonjol. Dalam kondisi masyarakat kita yang sampai saat ini masih berupaya mewujudkan cita-cita reformasi sekaligus bangkit dari keterpurukan di berbagai bidang akibat krisis multi dimensional dasawarsa, diundangkannya jati diri TNI menuai berbagai pandangan mengenai upaya pembangunan TNI menuju militer profesional. Hal terakhir inilah yang menjadi permasalahan di dalam tulisan ini. Tentara profesional adalah tentara yang diperintah oleh UU dan bukan lagi doktrin saptamarga.

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, tulisan ini menggunakan pendekatan sosiologi militer, terutama pandangan Samuel P. Huntington mengenai militer profesional. Inti pandangan Huntington adalah berubahnya korps perwira militer dari kelompok penakluk (*warrior*) menjadi kelompok profesional. Dalam *pandangan Huntington (1957:8-10)*, *militer profesional* adalah tentara yang;

- 1) memiliki keahlian (*expertise*), berupa pengetahuan dan keterampilan khusus di bidangnya, sehingga mengemban;
- 2) tanggung jawab (*responsibility*) terhadap masyarakat sebagai kliennya; dan
- 3) memiliki kesadaran kelompok (*corporateness*) di antara anggota profesinya yang berbeda dari orang awam. Harus diubah TNI dari tentara profesionalisme **Revolosiuner Perlmutterian** yang disebut sebagai tentara profesional revolusioner.

Kontrol sipil identik dengan pemerintahan demokratis, sementara kontrol militer identik dengan pemerintahan totaliter. Kontrol sipil dibedakan menjadi kontrol sipil subjektif (*subjective civilian control*) dan kontrol sipil objektif (*objective civilian control*). Dalam kontrol sipil subjektif, kekuatan sipil berusaha memaksimalkan kekuasaan (termasuk dengan mengorbankan kelompok-kelompok sipil lainnya) dan berusaha

menarik tentara ke dalam urusan sipil demi kepentingannya, baik kepentingan politik maupun ekonomi.

1) Dari Militer menuju TNI Profesional. Terkait dengan upaya membangun profesionalisme TNI, tiga hal utama yang perlu diperhatikan adalah keberadaan lembaga teritorial berupa Komando Teritorial (Koter), bisnis TNI, dan hubungan antara TNI dengan Departemen Pertahanan (Dephan). Ketiga isu ini pula yang secara khusus dibahas dalam tulisan ini.

Menurut Huntington (1957:264-265), pemeliharaan kekuatan bersenjata yang kuat akan cenderung mengurangi terjadinya perang dengan mencegah (*deterring*) musuh-musuh potensial untuk menyerang. Kendati demikian, secara sosiologis Huntington juga menyebutkan pentingnya hubungan yang erat antara militer dan masyarakat. Tentara terutama Angkatan Darat, bukanlah kasta khusus yang terpisah dari masyarakat, karena mereka harus “berada dalam hubungan yang segar dan konstan dengan pemikiran dan perasaan para warga sipil setempat”. Para perwira militer pun menekankan pentingnya tentara “berada dekat dengan masyarakat”. Atas dasar pemikiran ini pula lembaga teritorial dibentuk.

2) Komando teritorial antara postur pertahanan dan arus demokratisasi. Salah satu wujud gelar kekuatan TNI, khususnya Angkatan Darat, adalah hadirnya Komando Teritorial (Koter) yang membentang mengikuti struktur *hirarki* pemerintahan dan meliputi seluruh wilayah/daerah. Pada masa Orde Baru Koter tidak hanya melaksanakan fungsi teritorial di bidang pertahanan, melainkan juga memasuki berbagai aspek kehidupan: sosial, ekonomi, dan politik. Hal ini dinilai bahwa peran TNI lebih sebagai alat kekuasaan ketimbang alat negara dalam membangun sistem pertahanan yang kokoh. Meskipun demikian, tidak serta merta Koter dituntut untuk dibubarkan.

Seorang tokoh agama di Aceh berpendapat, dalam konteks masyarakat Aceh yang masih labil keberadaan Koter merupakan kebutuhan. Menurutnya, untuk memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat Aceh perlu ada kerja sama antara TNI dengan pemerintah daerah. Selain itu, keberadaan TNI juga

membantu rekonstruksi pasca tsunami dan rekonsiliasi Aceh pasca-Kesepakatan Finlandia.

3) Koter (Komando Teritorial) tidak relevan dimasa reformasi. Sementara itu, kelompok pandangan yang berbeda melihat Koter sebagai bagian dari peran dan fungsi TNI di masa lalu. Keberadaan Koter dan berbagai upaya mempertahankannya dinilai lebih sebagai strategi TNI yang tak rela meninggalkan secara total fungsi-fungsi non pertahanan yang dipegang dan dinikmatinya selama ini.

Mereka berpandangan, Koter harus dibubarkan karena tidak lagi relevan dari sisi peran dan fungsi. Selain itu, pembubaran Koter juga dianggap menjadi salah satu tuntutan Reformasi sejak 1998. Dihapuskannya doktrin Dwifungsi pada tahun 2000 memperkuat keharusan membubarkan Koter. UU No. 34/2004 juga tidak mengatur soal Koter. Mengemukakan isu supremasi sipil, menguatnya tuntutan profesionalisme TNI, dan terus bergulirnya arus perubahan serta demokratisasi, menjadi alasan sosiologis tersendiri mengapa pembubaran lembaga teritorial perlu dilakukan.

Kelompok pandangan ini menganggap Koter merupakan bentuk pemborosan dalam organisasi TNI. Menurutnya, walaupun Koter di-perlukan, keperluannya hanyalah untuk daerah-daerah tertentu yang dari sisi pertahanan bersifat strategis, rentan konflik, dan secara objektif memang memerlukan kehadiran tentara.

Pada masa depan Koter perlu dipikirkan untuk diganti dengan Komando Daerah Pertahanan (Kodehan) yang melibatkan semua Angkatan dan keberadaannya disesuaikan dengan kondisi daerah. Ada yang menyebutkan, menghilangkan Koter sama sekali adalah hal yang sulit dilakukan dan tidak sesederhana yang dibayangkan. Selain karena memang tidak kehilangan relevansi secara total, TNI AD juga akan berusaha mempertahankannya dengan berbagai cara. Di negara maju seperti Australia ternyata juga terdapat semacam Koter yang disebut *army territory* yang saat ini sedang dikembangkan. Prajurit Pretorian merupakan tipe militer yang melihat bahwa profesi militer dapat bertindak sebagai sebuah landasan politik. Semakin tinggi jabatan seorang perwira, semakin ia bersifat politis. Pretorianisme militer timbul ketika terjadi kegagalan revolusi sosial, politik, ataupun revolusi modernisasi. Tipe militer ini biasanya muncul di negara-negara agraris atau transisi atau secara ideologi terpecah-

belah. Sehingga secara potensial dan faktual tentara bersifat intervensionis, cenderung melakukan campur tangan permanen, dan memiliki kekuatan untuk mewujudkan perubahan konstitusi. Tentara jenis ini memberontak kepada negara atau rezim dan menolak integritas korporasi. Tentara praetorian adalah tentara pembela otonomi korporasi yang melihat bahwa organisasi militer berdiri sendiri tanpa adanya dukungan dari negara dan masyarakat.

Prajurit revolusioner merupakan militer sebagai alat revolusi di mana tipe militer ini memiliki kecenderungan untuk takluk di bawah politik. Prajurit profesional beringkah laku layaknya korporasi, tipe pretorian lebih menyukai pola-pola hubungan non-hierarkis yang bersahabat antara perwira dengan prajurit, sedangkan bagi tipe revolusioner mobilitas ke atas bukanlah hasil keahlian militer, melainkan berdasarkan pengabdian kepada revolusi dan dukungan partai. Semua kebutuhan TNI saat ini sepenuhnya diatur dan dikendalikan oleh Dephan. Masalah anggaran, misalnya, tidak lagi harus diajukan dan diperjuangkan sendiri oleh TNI di DPR, melainkan oleh Dephan. Demikian pula dalam hal pengadaan peralatan militer, saat ini sudah mulai ditangani Dephan, sementara TNI cukup mengajukan peralatan militer apa saja yang dibutuhkan.

Berbagai pandangan yang dikemukakan sebelumnya, baik menyangkut eksistensi lembaga teritorial, bisnis TNI, maupun hubungan TNI Dephan, dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama yakni (1) pandangan konservatif, yang cenderung mempertahankan pola-pola lama yang sudah mapan serta apa yang saat ini berlangsung sehingga kurang menghendaki terjadinya perubahan signifikan dalam tubuh TNI; (2) pandangan progresif, menghendaki dilakukannya perubahan mendasar serta perombakan total terhadap eksistensi Koter (Komando Teritorial), bisnis TNI, dan hubungan struktural TNI–Dephan; (3) pandangan moderat, yang berpendirian bahwa memang harus ada reformasi signifikan di tubuh TNI.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Penelitian ini berpedoman pada data atau sumber data yang

diambil langsung dari tempat atau lokasi penelitian baik data primer maupun data sekunder.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Pendekatan ini menunjukkan atau mendeskripsikan fenomena yang ada secara apa adanya. Hasil dari penelitiannya diuraikan secara jelas tanpa manipulasi dan menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya. Hasil penelitian dengan pendekatan deskriptif sering digunakan atau dilanjutkan dengan penelitian analitik. Pendekatan ini juga akan memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan kebenaran suatu masalah.

- 1) Wawancara. Teknik utama pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan pedoman wawancara tidak terstruktur.
- 2) Observasi. Teknik observasi ini digunakan untuk mengumpulkan data yang dapat mendukung data utama, yaitu mencermati kegiatan, keadaan, tindakan, dan upaya pendistribusikan logistik bersama dengan pemerintah.
- 3) Studi Dokumen. Teknik studi dokumen digunakan untuk memperkuat data dan informasi yang telah diperoleh peneliti agar lebih kredibel (dapat dipercaya).
- 4) Studi Kepustakaan. Studi Kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

TNI dan bisnis antara tuntutan kesejahteraan dan keterbatasan anggaran. Berdasarkan temuan lapangan bisnis TNI dapat diklasifikasikan menjadi enam tipologi, yakni;

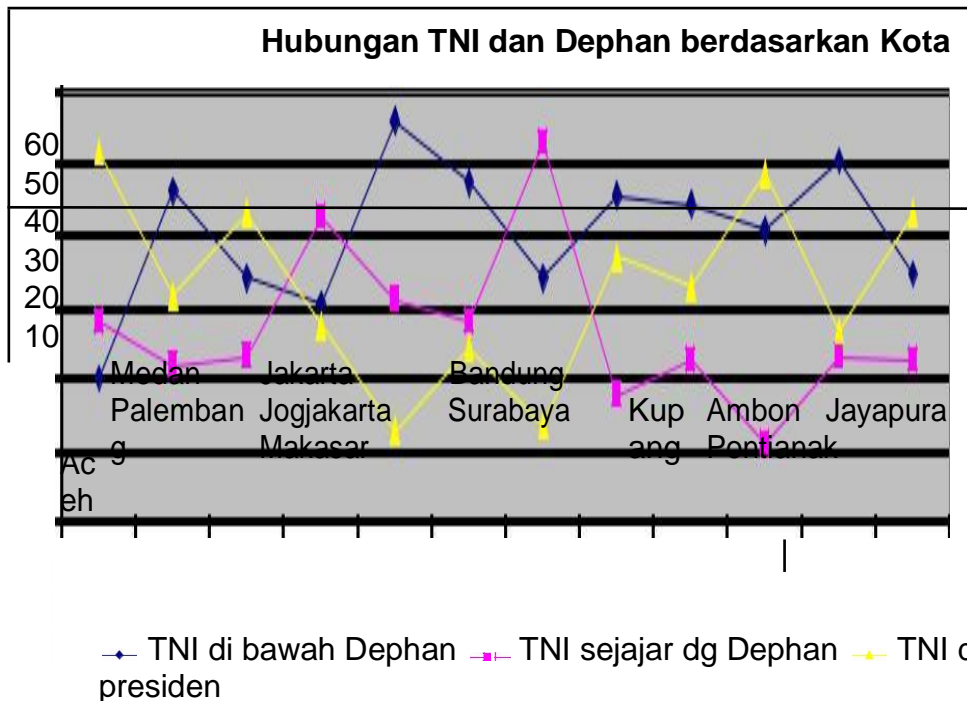
- 1) industri militer (*military industry*);
- 2) militer dalam industri (*military in industry*);
- 3) bisnis militer (*military bu- siness*);
- 4) yayasan nonprofit;
- 5) koperasi; dan
- 6) bisnis ilegal (*crime business*).

Berbagai kalangan masyarakat dan perwira TNI menghendaki tentara lepas dari segala bentuk kegiatan bisnis. Bisnis yang dikelola TNI selama ini, terutama yang berorientasi profit, dapat dialihkan kepada pemerintah. Selama ini bisnis dipandang tidak hanya menghalangi profesionalisme TNI, tetapi pada kenyataannya juga tidak mampu secara signifikan menyejahterakan seluruh prajurit karena hanya dikuasai oleh sekelompok orang saja. Kendati demikian, di antara informan dan peserta ada juga yang menghendaki koperasi dan yayasan nonprofit dipertahankan karena sangat membantu prajurit yang berpangkat rendah seperti Tamtama dan Bintara.

#### RELASI TNI DENGAN DEPHAN.

Pandangan yang menghendaki TNI berada di bawah Dephan, baik dari kalangan sipil maupun perwira, dapat dikatakan seimbang dengan mereka yang menghendaki TNI berada secara langsung di bawah Presiden, seperti ditunjukkan pada grafik berikut.

Grafik 1. Preferensi Masyarakat Terhadap Relasi TNI Dan Dephan di Masa Depan Berdasarkan Latar Belakang Daerah (N=1072)



Kepala Staf TNI AU Marsekal Herman Prayitno berpendapat, UU No. 34/2004 mengisyaratkan TNI berada di bawah Presiden. Adapun untuk urusan kebijakan, strategi, dan dukungan administrasi TNI berada di bawah koordinasi Dephan. Baginya, hal itu sudah terdapat dalam UU No. 34/2004.

Dalam banyak kasus, Panglima atau Kepala Staf Angkatan Bersenjata merupakan bagian integral dari Dephan. Namun, dalam konstelasi Indonesia, sistem konstitusi memberi peluang bagi Panglima TNI untuk berada secara langsung di bawah Presiden. Acuanya adalah UUD 1945 dan UU TNI.

#### PRAJURIT PROFESIONAL.

Bagi Panglima TNI Marsekal TNI Djoko Suyanto, TNI dalam posisinya sekarang ini sudah berada di bawah supremasi sipil. Semua kebutuhan TNI saat ini sepenuhnya diatur dan dikendalikan oleh Dephan. Masalah anggaran, misalnya, tidak lagi harus diajukan dan diperjuangkan sendiri oleh TNI di DPR, melainkan oleh Dephan. Demikian pula dalam hal pengadaan peralatan militer, saat ini sudah mulai ditangani Dephan, sementara TNI cukup mengajukan peralatan militer apa saja yang dibutuhkan.

Berbagai pandangan yang dikemukakan sebelumnya, baik menyangkut eksistensi lembaga teritorial, bisnis TNI, maupun hubung-an TNI Dephan, dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama yakni (1) pandangan konservatif, yang cenderung mempertahankan pola-pola lama yang sudah mapan serta apa yang saat ini berlangsung sehingga kurang menghendaki terjadinya perubahan signifikan dalam tubuh TNI; (2) pandangan progresif, menghendaki dilakukannya perubahan mendasar serta perombakan total terhadap eksistensi Koter(Komando Teritorial), bisnis TNI, dan hubungan struktural TNI Dephan; (3) pandangan moderat, yang berpendirian bahwa memang harus ada reformasi signifikan di tubuh TNI sebagai bagian dari upaya menjadikan TNI komunitas militer yang profesional, tetapi reformasi tersebut harus dilakukan secara bertahap agar tidak menimbulkan guncangan yang justru berekses buruk dan memunculkan masalah-masalah baru yang mungkin malah lebih rumit.

#### TNI MILITER PROFESIONAL.

Sebagai fenomena sosiologis, TNI merupakan bagian yang tak terpisahkan dari realitas kehidupan masyarakat dan bangsa. Sebagai kekuatan utama pertahanan nasional, TNI yang sedang berada di tengah-tengah pusaran perubahan, dihadapkan pada tantangan untuk menemukan identitas dirinya sebagai tentara profesional

Kepemimpinan sipil yang terpilih secara demokratis. Supremasi sipil menuntut militer tidak melakukan intervensi terhadap urusan sipil; dan sebaliknya, sipil pun tidak



mencampuri urusan-urusan internal militer, memasuki wilayah otoritas militer, atau berusaha menarik-narik TNI dalam urusan-urusan sipil yang berkaitan dengan masalah politik praktis.

Sesungguhnya TNI saat ini belum memenuhi kriteria lengkap sebagai tentara profesional, meskipun hasil penelitian menunjukkan TNI sedang berusaha mengarah ke sana. Demikian pula, jika mengacu pada persyaratan yang ditentukan UU No. 34/2004, TNI bersama masyarakat dan Pemerintah masih harus bekerja keras membangun dan mewujudkan militer profesional.

Setelah terbitnya UU TNI, TNI memiliki kecenderungan kuat untuk bergerak dari profesionalisme baru ala Stepan (*new professionalism*) menuju profesionalisme lama ala Huntington (*old professionalism*). Tetapi harus dipahami, pola gerak TNI dari profesionalisme baru menuju profesionalisme lama tidaklah persis seperti yang tergambar dalam teori Stepan dan Huntington. Maksudnya, predikat profesional (dalam pengertian profesionalisme lama Huntington) tidaklah menafikan aspek-aspek tertentu dari profesionalisme baru (ala Stepan) yang masih melekat pada TNI.

Aspek-aspek profesionalisme baru pada TNI justru muncul dari No. 34/2004. Setidaknya, ada tiga titik penting dalam UU itu yang memberikan warna profesionalisme baru pada TNI, yakni (i) memberi dan tetap mempertahankan jati diri TNI sebagai Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, dan Tentara Nasional (pasal 2); (ii) mele-takkan fungsi penangkal dan penindak terhadap ancaman bersenjata dari dalam negeri kepada TNI (pasal 6); (iii) mendefinisikan salah satu tugas pokok TNI, berupa operasi militer selain perang (pasal 7), seperti mengatasi gerakan separatisme bersenjata, pemberontakan ber-senjata, dan terorisme, serta membantu tugas pemerintahan di daerah.

## PRAJURIT PROFESIONAL.

Bisnis TNI haruslah diambil alih oleh pemerintah, baik seluruhnya maupun sebagian (dengan menyisakan koperasi dan yayasan nonprofit). Akan tetapi, pengambilalihan tersebut harus disertai de-ngan komitmen kompensasi bagi kepentingan kesejahteraan prajurit. Skenario ini akan menciptakan iklim ekonomi dan bisnis yang *fair* dalam masyarakat, juga berpengaruh kuat bagi pembangunan profesionalisme TNI karena TNI tak lagi direpotkan dengan masalah bisnis militer yang kontroversial.

Terkait dengan hubungan TNI Dephan, TNI perlu ditempatkan di dalam Dephan dengan tipe hubungan koordinatif. Dalam hal ini, harus ada koordinasi yang baik dan pembagian kerja yang jelas di antara TNI dan Dephan. Skenario ini akan memberikan dampak positif bagi menguatnya supremasi sipil, di mana sipil harus berusaha meningkatkan kemampuan dan pemahamannya tentang militer sehingga dapat tercapai pola hubungan koordinatif yang simetris. Dengan skenario ini, masyarakat pun akan memandang kesungguhan dan ketulusan TNI untuk tunduk pada supremasi sipil sesuai prinsip-prinsip demokrasi.

Adapun kekuatan yang mendorong upaya menuju militer profesional tergambar dalam prasyarat-prasyarat di bidang ekonomi, sosial, politik, teknologi, dan kurikulum pendidikan militer, sebagai berikut:

1. Prasyarat Ekonomi;
2. Salah satu kriteria tentara profesional yang disyaratkan oleh UU TNI adalah tentara harus terjamin kesejahteraannya. Pihak yang menjamin kesejahteraan TNI adalah negara, bukan TNI sendiri dengan berbisnis atau cara-cara lainnya;
3. Prasyarat Sosial;
4. Prasyarat ini terkait persoalan kultur dan kemampuan sumber daya prajurit TNI. Dalam konteks *outward looking*, prajurit TNI dituntut melakukan penyesuaian mendasar untuk menempatkan diri sesuai arus perubahan dan tuntutan demokrasi. Pada waktu yang sama, TNI harus meningkatkan kualitas sumber daya prajuritnya sesuai tuntutan perang modern dan wujud musuh yang dihadapi;
5. Prasyarat Politik;
6. Prasyarat ini terkait kehendak politik negara dalam memandang, memperlakukan, dan memosisikan TNI. Ketegasan negara (pemerintah sipil) dalam mendorong TNI menjadi militer profesional ditandai dengan kesungguhan para elite pemerintahan dan politisi memperlakukan TNI dalam kerangka kontrol sipil objektif;
7. Prasyarat Teknologi;
8. TNI harus terbuka terhadap kemajuan teknologi, baik teknologi informasi maupun teknologi perang. Penguasaan teknologi mutakhir merupakan sebuah keharusan demi terwujudnya tentara profesional;

9. Kurikulum Pendidikan Militer; dan
10. Membangun tentara profesional dengan kualitas sumber daya prajurit yang tangguh selayaknya dimulai dari lembaga pendidikan militer yang memiliki kurikulum relevan. Kualitas dan sistem pendidikan yang diberikan kepada para calon perwira diyakini berbagai kalangan akan sangat menentukan sosok, kualitas, dan sikap prajurit TNI kelak. Munculnya perwira-perwira *scholar officers* berwawasan luas merupakan kebutuhan fundamental dalam menjawab tantangan zaman yang semakin maju.

## SIMPULAN

Kriteria dasar militer profesional yang diperkenalkan Huntington, masih sangat relevan untuk menggambarkan kasus TNI yang saat ini sedang berproses menuju militer profesional. Begitu pula tesisnya tentang etika militer, ternyata bersinggungan positif dengan Kode Etik Prajurit dan Kode Etik Perwira milik TNI. Huntington mengontraskan antara etika militer dengan beberapa ideologi seperti *Liberalisme*, *Fasisme*, *Marxisme*, dan *Konservativisme*. Dari keempat ideologi tersebut, Konservativisme memiliki kemiripan dan kesesuaian dengan etika TNI. Namun demikian, tawaran ini tidak cukup memadai untuk menjelaskan secara komprehensif dan total sosok TNI sebagai militer profesional patriot. Selain itu, TNI di era Reformasi juga tidak bisa lagi digambarkan dengan teori militer praetorian yang diawali Weber dan disambut juga oleh Huntington, karena TNI tidak lagi berperan dan terlibat dalam kehidupan sosial, politik, dan bisnis seperti di masa Orde Baru. Sejak Reformasi TNI relatif cepat meninggalkan identitasnya sebagai militer praetorian menuju militer profesional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agger, B. 2003. *Teori Sosial Kritis: Kritik, Penerapan dan Implikasinya*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Alagappa, M. 2001a. "Investigating and Explaining Change: An Analytical Framework." *Coercion and Governance: The Declining Political Role of the Military in Asia*, disunting oleh Muthiah Alagappa. Stanford, California: Stanford University Press.
- . 2001b. "Asian Civil-Military Relations: Key Development, Explanations, and Trajectories." *Coercion and Governance: The Declining Political Role of the Military*

- in Asia*, disunting oleh Muthiah Alagappa. Stanford, California: Standford University Press.
- , 2001c. "Military Professionalism: A Conceptual Perspective." *Military Professionalism in Asia: Conceptual and Empirical Perspective*, disunting oleh Muthiah Alagappa. Honolulu, Hawaii: East-West Center.
- Culture in Indonesia*. Ithaca, New York: Cornell University Press.
- Anwar, D. F. 2001. "Insurgencies and Communal Conflicts: Governance and Security Indonesia's Plural Societies." *Non-Traditional Security Issues in Southeast Asia*, disunting oleh Andrew T. H. Tan dan J. D. Kenneth Boutin. Singapore: Institute of Defence and Strategic Studies.
- Aquero, F. *Soldiers, Civilians and Democracy: Post-Franco Spain in Comparative*. Baltimore: The John Hopkins University.
- Aribowo. 2003. "Koter dan Kepentingan TNI (AD) di Daerah." *Wa-cana Pembubaran Koter*, disunting oleh Muhammad Asfar. Sura-baya: PuSDeHAM.
- Asfar, M., ed. 2003. *Wacana Pembubaran Koter*. Surabaya: PuSDeHAM
- , 2002. *Restrukturisasi Koter, Peran TNI Pasca Rejim Soeharto*. Surabaya: PuSDeHAM.
- Baudrillard, J. P. 2004. *Masyarakat Konsumsi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Berger, P. L. dan Thomas L. 1966. *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. New York: Anchor Books.
- Branford, J. F. 2004. "The Indonesian Military as a Professional Organization: Criteria and Ramifications for Reform." *Southeast Asian Studies* 5(2).
- , 2000. "Mereformasi Hubungan Sipil-Militer." *Hubungan Sipil-Militer dan Konsolidasi Demokrasi*, disunting oleh Lary Diamond dan M. F. Plattner. Jakarta: Rajawali Pers.
- , 2004. *Who Are We: The Challenges to America's National Identity*. New York: Simon & Chuster.
- Kerbo, H. R. *Social Stratification and Inequality: Class Conflict in Historical Comparative Perspective*. New York: McGraw-Hill, Inc.
- Kompas*, Harian. 2004. Edisi 10 November.
- Kompas*, Harian. 2002. Edisi 31 Agustus.
- Kompas*, Harian. 2006. Edisi 2 September.
- Kompas*, Harian. 2006. Edisi 7 November.
- Koran Tempo*, Harian. 2006. Edisi 2 Mei.
- Liddle, R. W. 2006. "Intervensi SBY." *Majalah Berita Mingguan Tem-po*, 3 Desember.
- Ma'arif, Syamsul et al., ed. 2004. *TNI-Polri dalam DPR/MPR 1960-2004*. Jakarta: Markas Besar TNI.
- , 2002. "Kata Pengantar." *Hubungan Sipil-Militer di Indonesia Pasca Orba di Tengah Pusaran Demokrasi*, oleh Arief Yulianto. Ja-karta: RajaGrafindo Persada.
- Markas Besar TNI. 2001. *TNI Abad XXI: Redefinisi, Reposisi, dan Reaktualisasi Peran TNI dalam Kehidupan Bangsa: Langkah-Langkah Reformasi Internal Lanjutan (Tahap II)*. Jakarta: Mabes TNI.
- , 2000. *Sejarah TNI*, Jilid V (1984-2000). Jakarta: Pusat Sejarah dan Tradisi TNI.
- Markas Besar TNI Angkatan Darat. 2003. *Kodam sebagai Kompar-temen Strategis Pertahanan (Sistem Pertahanan Semesta)*. Jakarta: Kodiklat Mabes TNI AD